

CAN MASS MEDIA INVIGORATE DEMOCRACY? THE CASE STUDY OF INDONESIA

Alvian Dwiguntara Putra¹

¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Airlangga [alviandputra@gmail.com]

Abstract

The practice of unbalanced and partisan mass media can harm the democracy. The governor election of DKI Jakarta 2017 shows that mass media is more increasingly the conflict, especially by the large media groups who ruled by the elite political parties who took part in the governor election. Kompas present as one of the media who participated in watching the election process. The news from Kompas about the governor election of DKI Jakarta became our research object. The main purpose of this research is to know how the mass media that is not affiliated with political parties still relevant and able to strengthen the democracy or otherwise can weaken the democracy. This study uses the qualitative descriptive method with a content discourse analysis of Kompas newspaper from March until April 2017. This study shows that the mass media has a strategic role in strengthening democracy, but on the other side the mass media potentially can weaken democracy. The results of this study also show that Kompas in the governor election of DKI Jakarta 2017 support in strengthening democracy with balanced journalism and enforce the principles of humanity.

Keywords : *Democracy, Mass Media, Election*

1. INTRODUCTION

Dewasa ini, peranan media massa tidak lagi sekedar sebagai sumber informasi dan hiburan semata, media hadir dalam rangka pendidikan dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Itulah kenapa media disebut sebagai pilar keempat demokrasi (Coronel, 2003). Setidaknya terdapat beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi berkembangnya media, yaitu munculnya gagasan tentang demokrasi, revolusi industri, dan urbanisasi (Rivers, et al, 2004). Demokrasi yang memberikan kontribusi terhadap gagasan-gagasan kebebasan, menghendaki adanya media yang dapat mencegah tirani negara. Menurut Aristoteles, bentuk negara yang buruk adalah negara yang diarahkan untuk kepentingan penguasa semata (Ravitch dan Thernstrom, 2005).

Demokrasi yang memandang kebebasan merupakan tujuan utama yang harus dicapai. Kebebasan merupakan salah satu cara yang dapat melawan kesewenang-wenangan. Peredaran surat kabar pada awalnya bermula dari kantor pos, di mana pemberitaannya lebih banyak mendukung kekuasaan Kerajaan atau Pemerintahan. Akan tetapi dengan berakhirnya perang saudara dan revolusi industri, menyebabkan surat kabar mengalami pergeseran, di mana perdagangan mulai berkembang, sehingga surat kabar menjadi salah satu usaha ekonomi dan dibaca oleh masyarakat umum dan media tidak lagi hadir sebagai alat propaganda penguasa (Rivers, et al, 2004; McQuail,1989). Media massa saat ini bertransformasi sebagai kekuatan baru yang dianggap dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses politik.

Dalam beberapa dekade, tampilan media massa di Indonesia telah mengalami banyak pasang surut. Sejarah panjang Indonesia, menjadikan media massa mengalami banyak perubahan. Saat ini media massa bertransformasi dan memasuki babak baru dalam proses demokratisasi (Siregar, 2000; Prajarto, 2006; Yusuf, 2011). Pengalaman Pilpres 2014 contohnya, BBC mengungkapkan bagaimana Pilpres 2014 digunakan sebagai saluran kampanye oleh masing-masing kandidat. Media menjadi saluran propaganda dalam konteks Pemilihan Umum (dalam www.BBC.com, 2014). Pilpres 2014 menunjukkan bahwa media yang dimiliki oleh elite politik dimanfaatkan untuk kampanye dalam rangka kemenangan Pemilu. Tentunya hal tersebut berdampak pada kualitas serta *tone* pemberitaan yang dapat membahayakan demokrasi.

Fenomena Pemilihan Presiden 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa media massa telah disalahgunakan fungsinya dan bahkan menyudutkan salah satu pihak. Akibatnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan teguran kepada media yang dalam pemberitaannya tidak menghadirkan fakta yang berimbang (Kompas.com, 30 Januari 2017). Idealnya, dalam konteks demokrasi media massa hadir dalam rangka *check and balance*, tidak memihak kepada kandidat tertentu, dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada publik (Coronel, 2003). Kompas sebagai salah satu kelompok media massa besar di Indonesia telah hadir sejak tahun 1965 dan sejarah panjang Kompas menjadikan media tersebut sebagai salah satu media yang berpengaruh di Indonesia. Kompas dikenal dengan gaya jurnalisme yang menerapkan nilai-nilai humanisme tensesdental dengan menghormati individu-individu. KOMPAS menjadi salah satu media massa yang ikut memberitakan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Kompas hadir ditengah-tengah kelompok media besar lainnya yang telah dikuasai oleh elite politik yang ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Comment [R1]: Butuh rujukan soal profil dan visi-misi Kompas.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media massa yang tidak terafiliasi dengan partai politik dalam memberitakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Apakah media massa yang tidak terpolitisasi tersebut dapat memperkuat demokrasi dalam konteks Pilkada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media massa yang pemilikinya tidak terafiliasi dengan partai politik masih relevan dan mampu menguatkan demokrasi atau sebaliknya melemahkan demokrasi.

2. LITERATURE REVIEW

Tema tentang media, demokrasi, dan politik elektoral sudah banyak dikaji oleh para akademisi, salah satunya dilakukan oleh Wahyuni (2000) yang meneliti tentang relasi media, negara, masyarakat, dan pasar. Studi ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, relasi media dan negara berubah sejak Indonesia mengalami reformasi, dimana media tidak lagi menjadi corong dari kekuasaan negara yang represif. Sehingga fungsi kontrol media terhadap negara dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, relasi media dengan pasar kerap kali membuat media tunduk pada kepentingan kapital hingga mengabaikan unsur edukasi terhadap masyarakat. Kedua, relasi media dan masyarakat kerap kali mengalami benturan ketika media dianggap dalam pemberitaannya tidak menguntungkan atau melecehkan bagi suatu kelompok masyarakat.

Sedangkan Yusuf (2011) menilai bahwa adanya media massa di tingkat lokal membuat perkembangan politik lokal semakin dinamis. Media massa memberikan

ruang bagi munculnya perdebatan menyangkut kebijakan publik. Keberadaan media menjadi saluran politik masyarakat dalam berpartisipasi, baik dalam menyampaikan kritik maupun saran terhadap pemerintah. Akan tetapi, dia menilai munculnya media lokal juga menyimpan kontradiksi tersendiri. Media lokal cenderung dimanfaatkan oleh elite-elite lokal, terutama ketika memasuki momen pemilihan Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur. Akibatnya, pemberitaan yang dilakukan media lokal cenderung tidak seimbang, dan berpihak kepada salah satu kandidat, bahkan terkadang memunculkan konflik antar elite.

Penelitian lain yang membahas tentang konglomerasi media yang dikuasai elite partai politik dilakukan oleh Tim Remotivi (2014). Dalam penelitian ini mereka melakukan pengamatan terhadap lima stasiun televisi, terdiri dari RCTI, SCTV, Trans TV, TV One, dan Metro TV. Fokus pengamatan mereka adalah bagaimana media televisi tersebut melakukan pemberitaan seputar calon presiden dan partai politik menjelang Pemilu 2014. Laporan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem memiliki frekuensi pemberitaan tinggi di Metro TV. Selain itu pemberitaan terhadap kubu lawan pemberitaan Metro TV cenderung bernada sentimen negatif. Demikian pula dengan pemberitaan di TV One. Pemberitaan terhadap Partai Golkar dan Abu Rizal Bakri selaku pemilik TV One cenderung bernada positif, sedangkan berita partai dan tokoh lain cenderung negatif. Hal lain yang juga dibahas dalam penelitian ini soal iklan partai politik yang tidak proporsional, dimana iklan partai politik tertentu frekuensi penayangannya sangat tinggi sesuai dengan partai pemilik media. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa elite partai politik yang menjadi *owner* sekaligus pada media massa kerapkali tidak netral dalam melakukan pemberitaan.

Dengan adanya konglomerasi media yang dimonopoli oleh elite partai politik membuat media bekerja tidak profesional, dan mendistorsi peran media massa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam penguatan demokrasi (Meier, 2002). Padahal demokrasi dan media massa saling membutuhkan satu sama lain. Media tidak akan berkembang dengan baik tanpa didukung oleh sistem politik demokrasi, begitu pula dengan demokrasi membutuhkan media massa sebagai medium pembangunan demokrasi.

Dijelaskan oleh Coronel (2003), media massa pada prinsipnya memiliki peran yang sangat strategis dalam menguatkan demokrasi. Pertama, sebagai pengawas (*watchdog*) terhadap lembaga yang memiliki kekuasaan dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, maupun swasta. Fungsi pengawasan ini sangat dibutuhkan agar kekuasaan dan otoritas yang dimiliki tidak disalahgunakan. Kedua, sebagai ruang informasi dan forum diskusi (*information tool and forum for discussion*). Media bertugas menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga setiap informasi yang diberikan oleh media menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Demokrasi menjunjung tinggi partisipasi setiap warga negara, dan media diharapkan menjembatani partisipasi masyarakat, terutama mereka sedikit mendapat ruang dalam kehidupan sosial politik, seperti perempuan, kelompok minoritas, rakyat kecil, dan lain-lain.

Ketiga, media sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dan pembangunan konsensus (*peace and consensus builder*). Demokrasi tidak mungkin berkembang dalam situasi negara yang penuh dengan kekerasan dan perselihan. Demokrasi menyediakan mekanisme untuk menjembatani setiap perselihan dengan ruang mediasi

yang setara, sehingga setiap konflik yang berpotensi berujung kekerasan dapat diselesaikan secara damai. Disinilah tugas media massa menjadi bagian dalam memupuk perdamaian dengan memfasilitasi perselisihan yang ada di masyarakat agar tidak berkembang dalam bentuk kekerasan. Namun kritik Coronel (2003), yang terjadi banyak terjadi di banyak kasus media mengipasi api perselisihan dengan memihak, memperkuat prasangka, mengacaukan fakta dan menjajakan setengah kebenaran.

3. METHOD

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk memahami suatu konteks khusus (Moleong, 2014:6) dengan menggunakan rancangan atau desain penelitian kualitatif. Dengan demikian, penekanannya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan peneliti menangkap dan menemukan makna setelah menganalisis data secara mendalam (Neuman, 2015:197). Pengumpulan data dokumen yang bertujuan melakukan penelaahan terhadap sumber tertulis, khususnya dokumen-dokumen seperti surat-surat resmi, undang-undang dan sebagainya. Selain itu juga melakukan studi literatur dalam bentuk referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya didasarkan pada upaya membangun pandangan peneliti secara holistik, mendalam serta memastikan suatu fakta (Nasir, 1988: 212). Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dimaksud antara lain adalah surat kabar (koran) Kompas terhadap pemberitaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

3.2. Metode Pengumpulan Data

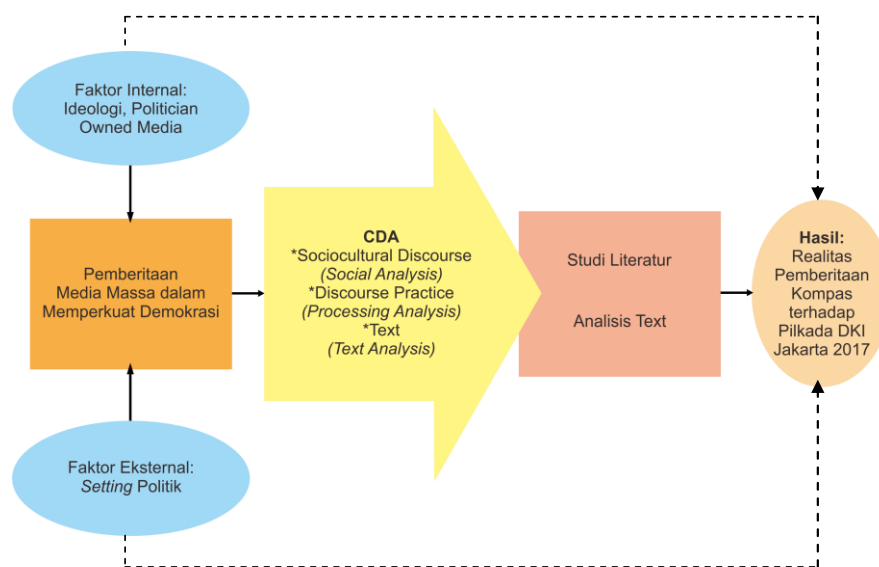
Data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan sumber data tertulis dari konten pemberitaan pada surat kabar Kompas terhadap Pilkada DKI Jakarta edisi bulan Maret-April 2017. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pemberitaan Kompas dalam konteks berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Selain itu, sumber tertulis lainnya adalah dokumen berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, yang nantinya menjadi acuan peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3.3. Teknik Analisis Data

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberitaan Kompas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dapat memperkuat demokrasi, dimana sesuai dengan peranan media massa tidak lagi sekedar sebagai sumber informasi dan hiburan melainkan hadir dalam rangka pendidikan dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Analisis wacana kritis yang dilakukan terhadap wacana yang berkembang dan dikembangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memiliki kekuasaan dengan memproduksi wacana dominan untuk menguasai ruang publik agar pihak-pihak lain juga ikut terdominasi dan terkuasai (Kuswandro, 2017). Alat yang digunakan untuk memproduksi wacana adalah bahasa, dimana bahasa tidak dipahami semata sebagai studi bahasa, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Adi, 2011).

Analisis wacana media secara kritikal dalam rangka kepentingan untuk menganalisis temuan, memperlihatkan keterpaduan (a) analisis teks, (b) analisis proses produksi, konsumsi dan distribusi teks, serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana tersebut (Hamad, 2004: 35). Dalam konteks penelitian ini, mengambil pemberitaan koran Kompas sebagai objek kajian, yang berupaya menerapkan pendekatan CDA untuk menganalisis konten pemberitaan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sehingga nantinya dapat diketahui realitas kecenderungan pemberitaan koran Kompas dalam memperkuat demokrasi. Dengan mengikuti aturan metodologi paradigma kritis secara *comparative methods*, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara *politician owned media* dengan media yang mempertahankan prinsip untuk netral terhadap politik. Adapun framework dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Picture 3.1. Research Framework



Sumber: Hamad, Diolah oleh Penulis, 2017.

Fenomena pemberitaan media massa dalam memperkuat demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Ideologi dan kepemilikan media oleh elite-elite politik menjadi salah satu faktor internal media dalam menyampaikan konten berita. Selain itu faktor eksternal yang disebabkan oleh setting politik menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pengumpul data yang bersumber dari data tertulis akan dilakukan analisis menggunakan pendekatan CDA yang selanjutnya lebih fokus dalam memperhatikan studi literatur dan analisis teks. Sehingga penelitian ini akan menjawab realitas pemberitaan koran Kompas terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017.

4. RESULT AND ANALYSIS

4.1. Setting Politik Pilkada DKI Jakarta 2017

Setiap menjelang Pilkada, DKI Jakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan perhatian tinggi. Selain karena faktor administratif dimana Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, kemenangan politik di Jakarta dianggap sebagai tiket menuju pertarungan elektoral berikutnya, yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi adalah contoh ideal dimana sebelum mencalonkan sebagai Presiden, dia melewati tangga Pilkada Jakarta dulu, baru kemudian setelah terpilih sebagai Gubernur hasil Pilkada tahun 2012, selang beberapa tahun dia mencalonkan diri sebagai Presiden dan terpilih pada Pilpres 2014. Maka tidak heran, momentum Pilkada Jakarta selalu berlangsung dengan tensi politik tinggi, penuh intrik, dan terkadang memicu konflik horizontal antar pendukung. (Murtadho, 2017)

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon, yang terdiri dari kubu petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdampingan dengan Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan terakhir Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni. Dari aspek dukungan Partai Politik, kubu petahana mendominasi dukungan Parpol yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Mengacu pada hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 di DKI Jakarta, Parpol pendukung Ahok-Djarot memiliki kursi mayoritas dengan perolehan 52 kursi. Adapun kubu Anies-Sandi didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Kursi mereka di DPRD Jakarta hanya 11 kursi. Sedangkan Agus-Sylvi didukung oleh Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PPP dengan perolehan kursi legislatif di DKI Jakarta sebesar 28 kursi.

Apabila mengacu ke dukungan Parpol, dimungkinkan kubu petahana menang. Namun demikian, fakta politik Pilkada Jakarta tidak sesederhana itu. Perolehan suara Parpol di legislatif tidak secara otomatis memberikan konsekuensi pada elektabilitas kandidat. Sebelum mendapat dukungan Parpol, Ahok berencana maju jalur independen lewat gerakan "Sejuta KTP" yang digagas oleh Teman Ahok, namun pada akhirnya Ahok memilih maju jalur Parpol, sebuah pilihan yang menunjukkan sikap realistis dan pragmatis.

Situausi politik Pilkada DKI Jakarta berlangsung dengan keras dan dramatis. Kubu petahana terbelit kasus "penodaan agama" karena pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang dianggap "menodai" agama Islam oleh sebagian umat muslim. Pidato Ahok ini kemudian menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah di Indonesia. Bak gayung bersambut, pidato Ahok tersebut kemudian menjadi alat untuk "menjatuhkan" Ahok.

Atas pidato Ahok itu, MUI Pusat sebagai lembaga asosisasi organisasi Islam mengeluarkan fatwa keagamaan yang menyatakan bahwa Ahok menghina Al-Qur'an dan atau menghina ulama (Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, 11 Oktober 2016). Fatwa MUI ini kemudian dijadikan legitimasi dan alat oleh sebagian umat Islam untuk "menjatuhkan" Ahok. Kemudian muncul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang melakukan demonstrasi berkali-kali di Jakarta dengan massa aksi dari berbagai daerah di Indonesia (CNN News, 5 November 2016). Meski tidak didukung oleh ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, aksi demonstrasi itu tetap berlangsung.

Sejak itulah, suasana politik di Jakarta berlangsung dengan situasi yang tidak kondusif. Isu sentimen agama dan etnis yang sejatinya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebhinekaan Indonesia berlangsung dengan massif di Jakarta, mulai

dari munculnya spanduk himbauan untuk tidak memilih calon non-muslim dan masalah tidak mensalatkan jenazah apabila mendukung calon tertentu. (BBC Indonesia, 24 Maret 2017).

Sesungguhnya, bila dikaji lebih mendalam. Sentimen identitas keagamaan dan rasisme yang ditunjukkan dengan menguatnya politik sektarianisme seperti narasi “anti Cina” “pemimpin kafir” hanyalah instrumen kekuasaan diantara faksi-faksi kekuatan oligarki untuk merebut kekuasaan (Pribadi, 2016). Hal yang tampak di permukaan seakan memperjuangkan kepentingan agama, namun demikian semakin ke atas di tataran elite sentimen keagamaan ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik pragmatis, termasuk memukul kubu lawan (Fealy, 2016). Sehingga situasi dan kondisi politik yang terjadi selama proses Pilkada tidak terjadi dengan sendirinya melainkan harus dilihat sebagai suatu peristiwa yang holistik dan kritis.

Bila disederhanakan, maka latar politik Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat digambarkan dengan beberapa hal. 1) Panggung politik Jakarta adalah arena elite politik untuk menegaskan eksistensinya lewat pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Setiap elite politik, terutama Ketua Umum Parpol akan tampil maksimal (*power full*) untuk memenangkan kandidatnya. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah pentas dan pertarungan bagi Megawati Soekarno (PDI-P), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat) dan Prabowo Subianto (Gerindra). Tanpa mengesampingkan elite politik yang lain, ketiga orang tersebut memiliki kepentingan yang sangat besar untuk Pilpres yang akan mendatang. 2) Penggunaan strategi kampanye SARA yang masif dan meresahkan masyarakat sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu karena untuk kasus Pilkada Jakarta hari ini isu SARA dapat membuat goyah popularitas petahana, termasuk di dalamnya membuat konsentrasi pemenangan petahana kacau.

4.2. Media sebagai Pengawas (*as watchdog*)

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung dengan tensi politik tinggi, ditambah adanya isu sentimen agama dan etnis yang mewarnai. Sehingga kerja pengawasan media melalui pemberitaannya sangat dibutuhkan, terutama dalam hal memastikan berjalannya Pilkada sesuai prosedur dan tidak ada penyelewengan yang dapat mencederai proses demokrasi.

Siapa saja yang perlu diawasi dalam Pilkada ini? Pertama, penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkat KPU hingga KPPS. Peran penyelenggara ini sangat strategis, sebab oleh undang-undang diberikan wewenang tinggi untuk melaksanakan Pilkada mulai dari *pre-election period* sampai *post-election period*. Kedua, peserta Pilkada yang terdiri dari pasangan calon. Peserta ini juga memiliki dukungan politik, baik dari Parpol maupun tim sukses. Sehingga pihak yang terkait dengan peserta juga perlu diawasi. Ketiga, lembaga atau pihak lain yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, seperti TNI, Kepolisian, maupun Birokrasi.

Pertanyaannya, bagaimana peran pemberitaan Kompas—terutama pada Pilkada putaran kedua saat kandidat bertarung *head to head*—memberikan pengawasan melalui pemberitaannya kepada penyelenggara, peserta, dan pihak-pihak terkait?

Pada pilkada putaran kedua, koran Kompas tetap menjadikan pemberitaan Pilkada Jakarta sebagai berita penting untuk diberitakan ke publik. Pilkada putaran pertama yang sudah berlangsung menyisakan catatan evaluatif, baik untuk

penyelenggara maupun peserta. Pada penyelenggara semisal, Kompas edisi 1 Maret 2017 menyajikan berita berjudul "Kinerja KPPS Perlu Dievaluasi". Berita ini menunjukkan perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada putaran pertama yang menyisakan beberapa catatan sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu. Berita ini memuat unsur adanya evaluasi kinerja KPU beserta penyelenggara pemilu ditingkat paling bawah, seperti KPPS untuk lebih dioptimalkan. Jika perlu, harus ada penggantian KPPS yang bekerja tidak optimal untuk memaksimalkan Pilkada putaran kedua.

Edisi berikutnya tanggal 4 Maret 2017, Kompas merujuk pada data Bawaslu memberitakan terjadi dugaan pelanggaran prosedur pada Pilkada putaran pertama, seperti adanya surat suara hilang, surat suara habis, dan pemilih berdokumen lengkap yang hilang hak pilihnya. Dalam pemberitaan Kompas edisi tersebut yang menjadi sorotan selain adanya dugaan pelanggaran, Kompas juga menyoroti bagaimana proses penyelenggaraan Pilkada hendaknya lebih sederhana, terutama dalam hal penyalinan dokumen dari tingkat KPPS. Penyederhanaan ini dibutuhkan agar proses Pilkada lebih optimal.

Kompas juga menyoroti masih maraknya spanduk provokatif yang muatannya mengandung unsur sentimen etnis, suku, dan agama. Dalam berita bertajuk "Spanduk Meresahkan Dicotot" tanggal 14 Maret 2017, Kompas menyoal masih adanya pihak-pihak tertentu yang melanggar dengan mengajak untuk tidak memilih calon tertentu dengan disertai sentimen SARA. Dalam berita ini disebutkan ada sekitar Total 336 spanduk dicopot dan diturunkan satuan polisi pamong praja. Adanya spanduk provokatif disatu sisi sangat merugikan bagi kandidat yang disasar sebab dapat membentuk citra buruk namaun di sisi lain menguntungkan kandidat lain. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemilu jujur, adil, dan setara (Surbakti, 2014). Kompas mengambil peran dengan memberitakan pelanggaran tersebut sebagai bentuk pengawasan agar tindakan serupa tidak diulangi dan menimbulkan efek jera.

Pengawasan lain yang diberitakan Kompas kepada penyelenggara agar hak pilih warga DKI Jakarta menjadi prioritas. Dalam berita bertajuk "Suara Rakyat Harus Jadi Prioritas" tanggal 11 April 2017, Kompas membahas bahwa pentingnya keterlibatan tim pasangan calon untuk ikut mengawasi dan aktif dalam proses verifikasi daftar pemilih tetap dan kebijakan penggunaan Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Pada edisi yang lain, tanggal 13 April 2017, Kompas manayangkan berita berjudul "Dua Jenis Suket untuk Pilkada 19 April 2017". Inti dari berita ini selain sosialisasi soal adanya kebijakan Suket, juga membahas perlunya pengawasan dari semua pihak agar tidak muncul Suket palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Berdasarkan analisa kami, peran Kompas dalam memberitakan Pilkada dapat dinilai sebagai bentuk pengawasan media, dimana Kompas secara serius berusaha menghadirkan pengawasan agar setiap pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pilkada dapat menjalankan fungsinya sesuai prosedur dan tidak mencederai proses demokrasi. Hal lain yang menjadi perhatian Kompas adalah bagaimana kekuasaan tinggi yang dimiliki oleh penyelenggara tidak terjadi penyelewengan, sehingga prinsip pemilu jujur, adil, dan setara dapat ditegakkan oleh penyelenggara dan peserta.

4.3. Media sebagai Informasi dan Forum Diskusi (*as Information Tool and Forum for Discussion*)

Demokrasi menurut Hans Kelsen memuat konsep kompromi, yaitu penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan salah satu pihak, akan tetapi lebih fokus bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. (Malian, 2012: 230) Sehingga ketersediaan ruang publik melalui media sebagai sarana interaksi dan keterlibatan partisipasi masyarakat dapat menjadi partisipasi model baru yang secara leluasa melibatkan setiap orang (CIPG, 2012). Partisipasi dari masyarakat dapat dilakukan melalui media dengan penyebaran informasi yang sesuai fakta dan membuat warga negara terlibat dalam pemerintahan. Keterlibatan media dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan informasi, seperti siapa yang akan dipilih dan kebijakan mana yang harus disetujui sekaligus juga menunjukkan siapa yang bertentangan. (Coronel, 2001: 13)

Keterlibatan media khususnya Kompas dalam pemberitaan kontestasi politik pada Pilkada DKI sebagai ruang informasi dapat dilihat dari pemberitaan: 1) kesiapan secara teknis penyelenggara pemilu; 2) visi, misi dan program dari kandidat calon; 3) edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan hak suara, munculnya berita *hoax* (belum terbukti kebenarannya), adanya praktik *money politic* dan intimidasi. Sedangkan partisipasi warga negara dalam media sebagai forum diskusi dapat dilihat dari munculnya beberapa topik pembahasan dalam pemberitaan Kompas yang didalamnya berisi konten diskusi, antara lain berupa argumentasi dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, ahli, dan elit-elit politik terkait isu-isu SARA.

Shoemaker (1996) menyampaikan bahwa media sebagai saluran untuk mentransmisikan kenyataan memiliki kewajiban untuk memberikan pandangan dasar yang sama tentang suatu peristiwa. Namun pada kenyataannya antar media dalam suatu wilayah yang sama memandang realitas sosial memiliki sudut pandang yang berbeda. Shoemaker (1996) mengungkapkan bahwa beberapa peneliti mempertimbangkan faktor konseptualisasi saluran yang berdasar pada struktur dan logika internal media dalam membuat konten pemberitaan. Melengkapi pernyataan tersebut Donohue (2012) menyatakan bahwa media massa bergantung dari sistem sosial dimana media dikendalikan oleh subsistem lainnya. Sehingga perlu adanya kontrol terhadap media didalam menyampaikan informasi. Penerimaan kontrol secara luas dapat diilustrasikan dengan temuan jajak pendapat yang berimbang.

Media massa merupakan pilar keempat demokrasi, untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur dalam pemberitaan. Shoemaker (1996) membagi enam poin penting pedoman kode etik sebagai wartawan profesional yang harus dilakukan untuk mendukung kebenaran dalam menyampaikan komunikasi massa melalui informasi publik sekaligus sebagai pembawa diskusi pada pemberitaan, yaitu:

1. Responsibility
2. Freedom of the Press
3. Ethics
4. Accuracy and Objectivity
5. Fair Play
6. Mutual Trust

Berdasarkan pemaparan poin-poin penting dalam kode etik tersebut, yang dapat digunakan untuk menganalisis pemberitaan koran Kompas terhadap media sebagai

alat untuk menyebarkan informasi sesuai fakta sekaligus sebagai forum diskusi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terletak pada poin *Accuracy and Objectivity*.

Akurasi dan objektivitas merupakan fondasi dari semua jurnalis, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- Kebenaran adalah tujuan akhir.
- Objektivitas dalam melaporkan berita adalah tujuan lain yang berfungsi sebagai standar kinerja seorang profesional yang berpengalaman.
- Tidak ada alasan untuk ketidakakuratan atau ketiadaan ketelitian.
- Judul berita koran harus sepenuhnya dijamin dengan kesesuaian isi artikel yang dibahas. Foto dan telecasts harus memberikan gambaran peristiwa yang akurat dan tidak menonjolkan kejadian di luar konteks.
- Laporan berita harus bebas dari ungkapan opini atau bias dan mewakili semua sisi dari sebuah isu.
- Partisan dalam komentar editorial harus berangkat dari kebenaran.
- Wartawan menawarkan analisis, komentar dan opini editorial mengenai acara dan isu publik kepada individu yang memiliki kompetensi, pengalaman dan penilaian memenuhi persyaratan.
- Artikel atau presentasi khusus yang ditujukan untuk advokasi atau kesimpulan penulis sendiri dan interpretasi harus diberi label seperti itu.

Dalam tahapan penulisan laporan berita harus menjunjung tinggi kebenaran dan objektivitas dalam melaporkan berita, hal ini dapat dilihat dalam Kompas edisi 4 Maret 2017 yang berjudul "Proses Akan Disederhanakan untuk Formulir C1, Tiga Berkas Harus Diisi KPPS". Berita tersebut membahas tentang adanya proses penyederhanaan dalam penyalinan dokumen dalam pemungutan suara agar terhindar dari kemungkinan distorsi, untuk memastikan kebenaran informasi berita ini juga menampilkan data dugaan pelanggaran prosedur Pilkada DKI 2017.

Berita selanjutnya adalah berita pada edisi 22 Maret 2017 yang berjudul "Basuki Tidak Berniat Menodai Agama", secara keseluruhan pemberitaan ini memberikan gambaran peristiwa sesuai dengan judul berita dan tidak menonjolkan kejadian di luar konteks. Selain itu isi pemberitaan juga menampilkan kutipan-kutipan dari pernyataan saksi ahli dan kuasa hukum Ahok yang memberikan keterangan pada tuduhan 'penistaan agama' yang diberikan kepada Ahok. Namun terdapat konten berita yang lebih menonjolkan diluar konteks dari judulnya pada Kompas edisi 1 April 2017 yang berjudul "Aksi Massa: Pemerintah Tampung Aspirasi Peserta" dan edisi 1 April 2017 yang berjudul "Moratorium Belum Diterima".

Berita tersebut lebih banyak membahas penetapan tersangka terhadap lima orang yang melakukan makar. Selain itu munculnya sub topik pembahasan "Sandi diperiksa" terkait laporan penggelapan dalam jual beli tanah juga merupakan pemberitaan diluar konteks dari isi berita terkait penggunaan surat keterangan untuk pilkada. Meskipun terdapat pemberitaan diluar konteks dari judulnya, akan tetapi isi berita tidak ada yang merugikan untuk kedua pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada DKI 2017. Hal ini diikuti dengan keterangan Sandi bahwa "ia lega setelah diperiksa karena menunjukkan dirinya tidak terlibat".

Media juga berperan sebagai forum diskusi terlihat pada koran Kompas edisi 16 April 2017 "Pesta Demokrasi Bebas Intimidasi" dan edisi 18 April 2017 bertajuk "Teror Verbal Sasar Perempuan". Beberapa berita tersebut memuat diskusi

masyarakat, tokoh-tokoh agama, ahli, dan elit-elit politik terkait pentingnya sosialisasi visi misi dan program kandidat calon agar masyarakat bisa menilai. Selain itu konten pemberitaan tersebut juga terkait komitmen menjaga persatuan dan keberagaman bangsa. Bahkan pada kasus-kasus tertentu mendiskusikan adanya ancaman serta teror verbal yang melibatkan unsur seksual terhadap perempuan yang memberikan dukungan terhadap kandidat calon tertentu pada kontestasi Pilkada DKI 2017.

Beberapa dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan koran Kompas berusaha untuk menjadi media massa yang memberikan informasi dengan berlandaskan fakta yang sesungguhnya, beberapa berita diikuti dengan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan dan memilih narasumber yang berimbang atau tidak melakukan pemihakan kepada salah satu kandidat calon atau kelompok tertentu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa Kompas memberikan judul pemberitaan dengan konten isi yang terkadang tidak sesuai konteksnya bahkan lebih menonjolkan diluar konteks pemberitaan.

4.4. Media Sebagai Penjaga Perdamaian (*as Peace Building*)

Media massa dalam konteks demokrasi memiliki peran penting sebagai pelindung demokrasi, sebagai kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi publik. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa dituntut untuk hadir sebagai kekuatan baru yang dapat melindungi segenap kepentingan publik. Media massa diharapkan dapat menyampaikan informasi-informasi yang dapat mendukung tercapainya konsensus dalam masyarakat.

Sejarah telah menunjukkan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa, dampak media terhadap munculnya konflik lebih besar daripada menciptakan resolusi konflik dan perdamaian. Sebagaimana Hitler yang menggunakan media untuk menyebarkan benih – benih kebencian terhadap kaum Yahudi, dan kaum minoritas lainnya. Kekerasan dan aksi genosida di Rwanda pada tahun 1990 menunjukkan bahwa media massa dapat menciptakan keadaan yang mencekam bagi masyarakat (Coronel, 2003; Bratic and Schirch 2007; Howard, 2002). Berdasarkan pengalaman tersebut, media massa dikritik atas pemberitaannya yang terlalu sensasional, yang terlalu bias, dan tidak melaporkan bagaimana fakta yang terjadi sebenarnya. Media massa dianggap tidak memainkan perannya secara netral dan berimbang.

Howard (2002) menyampaikan bahwa media massa seperti pedang bermata dua, dimana dia dapat menjadi senjata ampuh untuk menyampaikan propaganda atau memanipulasi informasi kepada publik untuk menciptakan sentiment negatif. Akan tetapi di lain sisi, media massa dapat menjadi instrumen untuk menciptakan resolusi konflik. Artinya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mengurangi konflik dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Dengan demikian media massa menjadi arena terbuka bagi berbagai macam kepentingan untuk menguasai opini dalam publik. Dalam konteks demokrasi, media massa menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta kontrol atas pelanggaran hak asasi manusia (SIDA, 2004).

Berangkat dari kerangka yang dibangun oleh Spurk (2002:7), media massa seharusnya bertujuan untuk mendukung aktivitas pembangunan perdamaian dengan cara sebagai berikut :

- Pemberitaan yang non partisan dan berimbang,
- Mempertanggung jawabkan informasi yang diterima dan yang disampaikan,
- Mencegah timbulnya konflik akibat pesan kebencian,
- Membantu korban dan pengungsi,
- Menciptakan platform agar setiap orang dapat berpendapat, dan
- Meletakkan nilai – nilai dasar untuk membangun struktur media yang bebas dan independen.

Tahap–tahap konflik yang terdiri dari *pre-conflict*, *conflict*, dan *post-conflict* berpengaruh terhadap bagaimana media menekankan pada kebutuhan–kebutuhan informasinya untuk pembangunan perdamaian (Spurk, 2002; Howard, 2002; Gilboa, 2009). Untuk dapat mengamati bagaimana peran Kompas sebagai *peacebuilding* dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, maka analisis framework yang digunakan adalah kerangka post conflict oleh Spurk (2002:10-11).

Table 4.1 Needs and Activities of Media Assistance in Post – Conflict Phases

NO	NEEDS	INTERVENTION
1.	Informasi yang akurat dan non partisan	Dukungan yang kuat terhadap pemberitaan yang berimbang (mencegah penyalahgunaan media untuk mendorong konflik)
2.	Strategi konsolidasi peacebuilding	Pemberitaan yang bertujuan untuk menjawab kesalahpahaman (memberikan pilihan dan solusi terhadap konflik)

Source: Spurk, 2002.

Dalam tahap post conflict, sangat penting untuk menyajikan pemberitaan yang non partisan, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan pasca terjadinya konflik. Pilkada DKI Jakarta 2017 sempat diramaikan oleh beberapa aksi atau demo besar–besaran dan beberapa konflik terkait isu SARA. Untuk mengetahui bagaimana fungsi *peace building* Koran Kompas dalam mengurangi dampak akibat konflik tersebut, dapat dilihat dalam Kompas edisi 22 Maret 2017 yang berjudul “Basuki Tidak Berniat Menodai Agama” dan edisi 1 April 2017 yang berjudul “Pemerintah Tampung Aspirasi Peserta”.

Pada edisi 22 Maret 2017, berita yang berjudul *Basuki Tidak Berniat Menodai Agama* tersebut mengangkat tema tentang proses pembelaan oleh saksi ahli Basuki selaku tersangka persidangan dugaan penistaan agama. Narasumber yang dimunculkan dalam berita tersebut adalah Ahmad Ishomuddin (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Rahayu Surtiati (Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia), dan Carolus Djisman Samosir (Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan). Penyajian informasi yang disampaikan oleh Kompas adaah dengan menyajikan keterangan–keterangan dari saksi ahli yang berusaha untuk menunjukkan bahwa pernyataan Ahok terkait surat Al–Maidah Ayat 51 tidak relevan. Pilihan–pilihan fakta

yang ditonjolkan adalah pada pendapat–pendapat saksi ahli terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut. Fakta–fakta tersebut antara lain adalah, bahwa konteks penggunaan surat Al–Maidah tidak sesuai dengan konteks pilkada atau digunakan untuk memilih pemimpin. Selain fakta bahwa konteks surat Al–Maidah yang turun pada saat peperangan tidak sesuai dengan kondisi Pilkada, fakta lain yang ditonjolkan adalah berdasarkan analisis dari sudut kebahasaan, ucapan Ahok tidak menyebutkan isi surat Al–Maidah Ayat 51 sebagai alat untuk membohongi umat muslim. Fakta selanjutnya yang ditonjolkan adalah, bahwa seharusnya hukum pidana material yang dikenai kepada Ahok harusnya batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965.

Berita selanjutnya adalah berita pada edisi 1 April 2017 yang berjudul *Pemerintah Tampung Aspirasi Peserta*. Berita tersebut mengangkat tema tentang konsolidasi paska terjadinya aksi 313. Narasumber yang muncul dalam berita tersebut adalah Wiranto selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Usamah Hisyam (perwakilan peserta aksi 313), Jendral Rikwanto (Divisi Humas Polri), dan nama yang sempat disinggung dalam pemberitaan tersebut adalah Hutomo Mandal Putra alias Tommy Soeharto (putra mantan Presiden Soeharto). Penyajian informasi yang disampaikan adalah dengan menyajikan bagaimana pemerintah mengamankan aksi yang berlangsung selama pilkada DKI Jakarta 2017. Fakta yang ditonjolkan adalah, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Wiranto sudah menerima tuntutan dan aspirasi dari para peserta aksis 313, begitupun sebaliknya, perwakilan aksi 313 sangat menghargai karena pemerintah mau mendengar tuntutan mereka. Selain itu, fakta lainnya yang juga mendapatkan porsi pemberitaan cukup besar adalah pada pengangkapan lima tersangka kasus makar dan pemanggilan Tommy Soeharto terkait kasus dugaan pemufakatan makar.

Berdasarkan pengamatan dari pemberitaan tersebut, KOMPAS mencoba untuk mendinginkan suasana dengan melakukan pemberitaan yang *tone* pemberitaannya bersifat netral dan tidak melebih-lebihkan, mengingat pada saat itu suasana pilkada DKI Jakarta 2017 masih sangat panas. Misalnya saja pada edisi 22 Maret 2017, memang porsi pemberitaan lebih fokus pada Ahok yang pada saat itu masih berstatus sebagai calon kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017, akan tetapi berita tersebut tidak menyulut provokasi atau merugikan pihak lain. Pemberitaan tentang kasus Ahok tersebut bertujuan untuk mengawasi jalannya persidangan agar transparan. Kompas juga berusaha untuk meredam konflik dengan berulang kali menonjolkan frase “tidak berniat menodai”. KOMPAS berusaha untuk mengurangi pandangan – pandangan skeptis yang berbau SARA kepada masyarakat dengan melakukan penyadaran bahwa konteks surat Al – Maidah *tidak relevan* digunakan dalam situasi pilkada. Sehingga tidak seharusnya, isu agama menjadi pemecah persatuan bangsa yang mengedepankan nilai – nilai pluralisme demokrasi.

Selain berusaha untuk mengurangi konflik–konflik horizontal, Kompas berusaha untuk menunjukkan bahwa setiap warga negara dijamin kebebasan berpendapatnya oleh negara, bahwa negara selalu hadir untuk menjamin kehidupan warga negaranya. Hal tersebut dapat terlihat pada teks berita yang dimuat pada tanggal 1 April 2017 dengan judul *Pemerintah Tampung Aspirasi Pemerintah*. Selain menjamin kebebasan berpendapat, negara juga berusaha untuk menjamin keamaan yang dapat merusak disintegrasi bangsa melalui isu–isu makar. Pemberitaan tentang isu–isu makar rupanya mendapatkan porsi yang lebih banyak, daripada

pembahasan tentang aksi 313. Kompas berusaha untuk memberikan gambaran bahwa suasana Indonesia tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kasus makar. Pemilihan frase *makar* dinilai juga tidak menimbulkan ketakutan pada publik, berbeda dengan istilah kudeta yang selalu identik dengan militer, represif, dan paksaan.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, Kompas dengan pemilihan narasumber yang netral, dalam artian narasumber adalah pihak-pihak yang bukan merupakan aktor utama yang terlibat menunjukkan independensi dan profesionalitasnya sebagai media massa. Berita yang ditampilkan juga tidak mengandung unsur *hate speech* atau propaganda terhadap aksi lainnya. Perlu diketahui bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 telah menjadi sejarah baru bagi proses demokrasi di Indonesia. Permasalahan seputar Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan pada kualitas program kerja, melainkan pada isu-isu privat, isu *person to person*. Aksi-aksi penolakan, pengecaman, intimidasi yang diterima oleh kelompok tertentu menunjukkan bahwa gesekan-gesekan horizontal dalam kelompok masyarakat masih rawan terjadi. Sadar akan urgensi agenda demokrasi, Kompas mencoba menyajikan pemberitaan yang sarat akan kedamaian.

Sebagai *peace building*, Kompas mampu melaksanakan perannya dengan baik. Kompas berusaha untuk mewakili semua kelompok kepentingan dalam pemberitaannya, berusaha untuk menjadi media massa yang non partisan dan akuntabel. Paska meletusnya aksi 411 pada 4 November 2016, Kompas berusaha untuk menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia dengan mengedepankan berita-berita yang berakar pada nilai-nilai toleransi, berita-berita yang tidak menggunakan isu "murahan" atau fitnah. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah konflik lanjutan yang dapat mengarah pada kekerasan jika tidak segera diredam.

5. CONCLUSION

Penegakan media massa yang bekerja secara profesional, kritis, dan mengedepankan kepentingan membangun demokrasi ditengah kuatnya arus pragmatisme media tidaklah mudah. Apalagi, gejala media massa partisan dan berafiliasi terhadap Papol menjadi fenomena yang marak pasca reformasi di Indonesia. Sehingga, kehadiran media massa yang setia pada jalur menjadi pilar penyangga demokrasi sangat dibutuhkan.

Ulasan dalam artikel ini dapat menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam menguatkan demokrasi, namun di sisi lain media massa juga berpeluang untuk menghancurkan demokrasi dengan propaganda berita yang mengarah pada perpecahan dan konflik berkepanjangan. *Kedua*, intensitas konflik dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini sangat tinggi, terutama yang dilatarbelakangi sentimen agama dan etnis. Akibatnya Pilkada berlangsung dengan keras, bahkan mengarah pada tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Ketiga*, Kompas dalam memberitakan Pilkada DKI Jakarta 2017 selama fase putaran kedua dapat dikatakan berimbang, tidak memihak kepada kandidat tertentu, dan mengedepankan prinsip untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Saat seteru Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung dengan sentiment SARA dan dikawatirkan membawa ke arah perpecahan dan tindakan kekerasan, Kompas hadir dengan pemberitaannya agar sentimen SARA dihentikan, dan mensosialisasikan prinsip-prinsip HAM dalam berdemokrasi. Kompas

memperingatkan bahwa kampanye SARA tidak sesuai dengan prinsip Pemilu berintegritas dan berkeadilan. Ketika di putaran pertama terjadi pelanggaran Pilkada, Kompas juga mengingatkan agar diantisipasi dan tidak terjadi kembali di putaran kedua. Di sisi lain, Kompas juga menjadikan Pilkada sebagai ajang partisipasi bersama, hal ini dibuktikan dengan mengajak masyarakat, terutama warga Jakarta untuk terlibat aktif dalam Pilkada, baik dalam memberikan hak suara ketika pemilihan maupun menjaga kualitas demokrasi agar tidak tercederai.

6. REFERENCES

- A., Meier. (2002) "Media Ownership – Does it matter?" in *Networking Knowledge for Information Societies: Institutions & Intervention* (eds. Robin Mansell, Rohan Samarajiva and Amy Mahan). Delft University Press.
- Coronel, S. (2003). *The Role of the Media in Deepening Democracy*. Manila: Philippine Center for Investigative Journalism. Diakses dari <http://unpan1.un.org> (diakses pada 23 Juli 2017).
- CREAME (2012). *Tentang Media dan Demokrasi*. CIPG: Centre for Innovation Policy & Governance). Diakses dari www.cipg.or.id (diakses pada 27 Juli 2017).
- Donohue, G.A., Tichenor, P.J. & Olien, C.N. (2012). *Mass Media Functions, Knowledge and Social Control*. [online]. Tersedia di www.aejmc.org. (diakses pada 27 Juli 2017).
- Bractic, Vladimir and Schirch, Lisa. (2007) *Why and When to Use The Media for Conflict Prevention and Peacebuilding*. Issue Paper 6. European Centre for Conflict Prevention. [online]. Tersedia di: <http://www.gsdrc.org> (diakses pada: 28 Juli 2017).
- Gilboa, Eytan. (2009). *Media and Conflict Resolution: A Framework for Analysis*, 93 Marq. L. Rev. 87. Tersedia di: <http://scholarship.law.marquette.edu> (diakses pada: 28 Juli 2017).
- Heychael, Muhamad dan Holy Rafika Dhona (2014), *Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*. Jakarta: Remotivi.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Malian, Sobirin. (2012). *Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Melalui Pemikiran Hans Kelsen*. SUPREMASI HUKUM: Vol. 1, No. 1. [online]. Tersedia di: www.aifis-digilib.org (diakses pada: 27 Juli 2017).
- McQuail, Dennis. (1989). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: ERLANGGA.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7. Jakarta: Indeks.
- Prajarto, Nunung. (2006). "New Media dan Demokrasi: Menimbang Peluang", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 9 No. 3.
- Ravitch, Diane and Thernstrom, Abigail (ed.). (2005). *Demokrasi: Klasik dan Modern*, diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rivers, William L., et al. (2004). *Media Massa & Masyarakat Modern* Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna. Jakarta: KENCANA.

- Shoemaker, J. Pamela & Reese, D. Stephen. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. USA: Longman Publishers. [online]. Tersedia di <https://journalism.utexas.edu> (diakses pada: 27 Juli 2017).
- SIDA. (2004) *Assistance to Media in Tension Areas and Violent Conflict*. UNESCO [online]. Tersedia di: <http://www.unesco.org> (diakses pada: 28 Juli 2017).
- Siregar, Ashadi. (2000). "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vpl. 4 No. 2.
- Spurk, Christoph. (2002). *Media and Peacebuilding Concepts, Actors, and Challenges*. KOFF [online]. Tersedia di: <http://www.swisspeace.ch> (diakses pada: 28 Juli 2017).
- Wahyuni, Hermin Indah. (2000) "Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar dalam Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 4 No. 2.
- Yusuf, Iwan Awaluddin. (2007) "Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 14 No. 3.
- Pribadi, Airlangga. (2016). *Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki*, Jurnal Maarif Vol. 11, No. 2.
- Sangaji, Anton. (2017). *Kontradiksi Kapitalisme dan Rasisme*, dalam Dede Mulyanto dan Coen Husain Pontoh (ed), "Bela Islam atau Bela Oligarki? Pertalian Agama, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia", Pustaka Indoprogres dan Islam Bergerak.

Artikel Koran Cetak :

- Anonim. (2017) 'Basuki Tidak Berniat Menodai Agama', *KOMPAS*, 22 Oktober, p. 3.
- Anonim. (2017) 'Pemerintah Tampung Aspirasi Peserta', *KOMPAS*, 1 April, p. 27.
- Anonim. (2017) 'Proses Akan Disederhanakan untuk Formulir C1, Tiga Berkas Harus Diisi PPS', *KOMPAS*, 4 Maret, p. 27.
- Anonim. (2017) 'Moratorium Belum Diterima', *KOMPAS*, 1 April, p. 27.
- Anonim. (2017) 'Suara Rakyat Harus Jadi Prioritas', *KOMPAS*, 16 April, p. 27.
- Anonim. (2017) 'Pesta Demokrasi Bebas Intimidasi', *KOMPAS*, 18 April, p. 1.
- Anonim. (2017) 'Teror Verbal Sasar Perempuan', *KOMPAS*, 18 April, p. 28.
- Anonim. (2017) 'Kinerja KPPS Perlu Dievaluasi', *Kompas*, 1 Maret 2017
- Anonim. (2017) 'Spanduk Meresahkan Dicapot', *Kompas*, 14 Maret 2017
- Anonim. (2017) 'Dua Jenis Suket untuk Pilkada 19 April 2017', *Kompas*, 13 April 2017

Artikel Media Online :

- Karana, Pinta. (2014) 'Pilpres 2014: Ketika media jadi corong propaganda', *BBC Indonesia*, 4 Juli [online]. Tersedia di: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140702_lapsus_medi_a_bias (diakses pada: 28 Juli 2017).
- Kuswandoro, Wawan. (2017). 'Analisis Wacana Kritis - Critical Discourse Analysis - CDA', 9 Maret [online]. Tersedia di: <http://wkuswandoro.com/analisis-wacana-kritis-critical-discourse-analysis-cda/> (diakses pada: 28 Juli 2017).

Adi, Tri Nugroho. (2011) 'Critical Discourse Analysis (CDA)', 18 Agustus [online]. Tersedia di: <https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/08/18/critical-discourse-analysis-cda/> (diakses pada: 28 Juli 2017).

Murtadho, Roy. (2017). *Politik Sektarianisme: Benarkah Jakarta Telah Jatuh Ke tangan Kaum Intoleran?* <https://indoprogres.com/2017/04/politik-sektarianisme-benarkah-jakarta-telah-jatuh-ke-tangan-kaum-intoleran/> (diakses pada: 27 Juli 2017)

Fealy, Greag. (2017). *Bukan sekedar Ahok: Menjelaskan Aksi Massa pada 2 Desember.* Tersedia di <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bukan-sekedar-ahok-menjelaskan-aksi-massa-pada-2-desember/> (diakses pada: 27 Juli 2017)

BBC Indonesia. (2017) *Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353> (diakses pada 27 Juli 2017)

Kompas.com (2017) *KPI Beri Peringatan Tiga Televisi Terkait Pemberitaan Pilkada DKI.* Tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/21072201/kpi.beri.peringatan.tiga.televisi.terkait.pemberitaan.pilkada.dki> (diakses pada: 27 Juli 2017)

Dokumen

Keputusan Fatwa MUI: Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI, 11 Oktober 2016